BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. Teknologi telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi, interaksi, dan transaksi. Saat ini, hampir semua aspek kehidupan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi dan telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi, globalisasi berkembang sangat cepat karena teknologi dapat menciptakan dunia digital yaitu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu.

Sistem teknologi informasi dan komunikasi telah diimplementasikan hampir terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis manufaktur ke arah digital *economy* berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *kreatif economy*.¹ Semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan teknologi informasi tersebut telah mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali cara manusia melakukan kegiatan transaksi perdagangan.

Kegiatan perdagangan pada saat ini sudah sangat berkembang. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan transaksi jual beli secara langsung

¹ Edmon makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan atau menjual barang atau jasa melalui teknologi. Bentuk inovasi perdagangan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi ialah *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu perdagangan yang menyediakan sarana yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi, yang mana dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.² Secara konsep *e-commerce* diibaratkan seperti pasar tradisional virtual.

e-commerce dapat diselenggarakan melalui berbagai platform yakni *marketplace*, media sosial dan *website*. Salah satu platform *e-commerce* yang menjadi tren pada saat ini adalah *marketplace* seperti, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, Lazada dan sebagainya. Selain menjadi tren *marketplace* juga menjadi platform berbelanja yang paling dipercaya berdasarkan survei yang dilakukan oleh SIRCLO-perusahaan *e-commerce enabler* penyedia solusi bisnis pada tahun 2019.³

Pada tahun 2020 terjadi melonjaknya kegiatan belanja online yang dilakukan masyarakat Indonesia selama wabah pandemi covid19. Hal tersebut dikarenakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi dengan mobilitas secara langsung di tengah kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada September 2020, transaksi *e-commerce* di Indonesia meraup nilai transaksi

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 15.

³ SIRCLO, "Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia Di Tahun 2020 Meningkat Pesat", Artikel, www.sirclo.com, 13 mei 2020.

hingga mencapai Rp. 180,74 Triliun.⁴ Nilai transaksi ini menunjukkan bahwa jumlah transaksi *e-commerce* telah meningkat dua kali lipat dari sebelumnya, peningkatan tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi dan bisnis. Namun maraknya belanja online menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah perlindungan terhadap data pribadi konsumen dan pelaku usaha pengguna *e-commerce*, Masalah utama yang sering timbul adalah kebocoran data pribadi. Pada praktiknya pengguna *e-commerce* diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi sejumlah data pribadi kepada *platform* tersebut, dengan diterimanya data pribadi oleh *marketplace* tersebut memicu kerentanan terjadinya kebocoran data yang akan menimbulkan kerugian bagi para pengguna.

Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (*intentional threats*) maupun tidak disengaja (*inadvertent threats*) kepada pihak yang tidak berwenang.⁵ Kebocoran *inadvertent threat* adalah kebocoran data yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan data pribadi pengguna layanan *e-commerce* seperti ketika terjadinya *configuration error* dan *improper encryption* hingga adanya ancaman dari pihak internal seperti *cyber espionage* dan *sabotage* oleh pegawai layanan *e-commerce* untuk

⁴CNN Indonesia, "Transaksi E-Commerce Capai Rp.180,74 T Per September 2020", www.cnnindonesia.com, Artikel, 16 Desember 2020.

⁵Maiche delpiero et.all, "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggung jawaban Online Marketplace Pada Kasus Kebocoran Data" *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm.3.

membocorkan data-data pribadi tersebut, baik untuk menjualnya kembali atau untuk kebutuhannya sendiri. Selain itu kebocoran data juga dapat dilakukan secara sengaja yang berasal dari faktor eksternal seperti peretasan data melalui serangan siber misalnya dengan *hacking*, *virus*, *trojans*, hingga *encrypting ransomware*⁶.

Kebocoran data pribadi dapat menjadi langkah awal untuk munculnya berbagai macam aktivitas mengganggu seperti *spam* pada email dan sms dan lain sebagainya. Selain itu data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan siber yang merugikan konsumen. pada praktiknya seringkali pelaku kejahatan siber melakukan *phising*, yang merupakan sebuah metode penipuan yang membuat korbannya secara tidak langsung memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pelaku.⁷ Adapun metode *phising* dapat berupa *social engineering attacks*, *manipulasi link*, hingga *website forgery*.

Beberapa waktu terakhir terdapat banyak kasus kebocoran data di layanan *marketplace* Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Tokopedia

Pada tanggal 1 mei 2020, sebanyak 91 juta data konsumen dan 7 juta data pelaku usaha ditawarkan dalam forum *hacker*. Sehingga tokopedia dan kemenkominfo digugat oleh komunitas konsumen indonesia (KKI) senilai Rp. 100 miliar. Bocornya data oleh peretas hingga dilakukan penjualan

⁶ *Ibid.*

⁷ Mia haryati Wibowo Dan Nur Fatimah, "Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime" *Jurnal Of Education And Information Communication Technologi*, Volume 1 Nomor 1 2017, hlm. 2.

merupakan indikasi bahwa tokopedia tidak menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah.⁸

2. Lazada

Dilaporkan sebanyak 1.1 juta data pelanggan terkena peretasan.⁹

3. Bukalapak

Dilaporkan 13 juta data pengguna bukalapak diperjualbelikan oleh peretas pakistan yaitu gnostic players pada tahun 2019.¹⁰

4. Bhinneka

Sebanyak 1.2 juta data pengguna yang bocor dan diperjualbelikan di *darkweb*.¹¹

Kasus diatas dapat diketahui bahwa data pengguna layanan *e-commerce* khususnya terkait platform *marketplace* sangat rentan akan kebocoran data pribadi penggunanya. Hal ini tentu menjadi ancaman nyata, sehingga diharapkan kepada penyedia layanan *e-commerce* di Indonesia dapat meningkatkan upaya *preventif* untuk mencegah kebocoran data dan melindungi data pribadi penggunanya.

Menurut Warren dan Brandeis yang di kutip oleh Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina:

Data pribadi merupakan hak privasi yang harus dilindungi karena beberapa hal yaitu:

⁸ CNN indonesia, “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor Dan Dijual”, cnnindonesia.com, Artikel, 3 mei 2020.

⁹ Kompas, “Lazada Kebobolan 1.1 Juta Data Pengguna Redmart Diretas”, kompas.com, Artikel, 1 November 2020.

¹⁰ Kumparantech, “Bukalapak Akui 13 Juta Data Yang Dijual Hacker Adalah Peretasan Di Maret 2019”, m.kumparan.com, Artikel, 6 Mei 2020.

¹¹ CNBC Indonesia, “1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”, cnbcindonesia.com, Artikel, 12 Mei 2020.

1. dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. seseorang dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan.
3. privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
5. Hal selanjutnya privasi harus dilindungi karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹²

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur oleh berbagai regulasi yaitu Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, seperti pada pasal 30 pada bab perbuatan yang dilarang.

Pasal 30

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

¹² Sekarling Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1 April 2021, hlm. 4.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Dalam UU ITE ini hanya menyebutkan “dokumen elektronik yang bersifat tidak publik” tidak menjelaskan secara spesifik data pribadi milik orang seperti apa saja yang patut di lindungi, ruang lingkup terkait data pribadi, data pribadi yang seperti apa dapat dianggap data yang sensitif dan sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, yang akan menyulitkan publik untuk mempersoalkan secara hukum atas dugaan pencurian data pribadi atau kebocoran data pribadinya.¹³ Serta belum adanya ketentuan tentang bagaimana pertanggung jawaban penyedia layanan *e-commerce* dalam kasus kebocoran data, dan belum adanya ketentuan tentang sanksi secara komprehensif bagi penyedia layanan *e-commerce* yang gagal dalam mengamankan data pribadi penggunanya.

Peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan *e-commerce* yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. dan

¹³ Muhammad Hasan Rumlus Dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik” Jurnal HAM Volume 11 Nomor 2 Agustus 2020, hlm.10.

dalam kaitannya dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dari ketiga regulasi tersebut perlindungan terhadap data pribadi bagi pengguna layanan *e-commerce* oleh pemerintah dibebankan kepada penyedia layanan *e-commerce*. Seperti pada Pasal 14 Ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, menyatakan “penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi” Dan pada PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyatakan “ pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktis bisnis yang berkembang”

Dalam hal terjadi kebocoran data pribadi, pihak penyedia layanan *e-commerce* mempunyai waktu 14 hari untuk mengabarkan telah terjadi kebocoran data, hal ini telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PDPSE dan pasal 14 ayat 5 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang PSTE.

Pasal 28 Huruf C Peraturan Menteri KOMINFO Tentang PDPSE
“Pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.”

Pasal 14 ayat 5 PP No 71 Tahun 2019 Tentang PSTE
“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut.”

Sanksi yang diberikan terhadap kegagalan dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 20 Tahun 2016 Pasal 36

- 1) Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 3) Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Upaya preventif serta sanksi yang diberikan tersebut kurang maksimal, mengingat dengan tenggang waktu yang cukup lama dalam pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi, memungkinkan telah terjadi banyak kejahatan siber yang dapat merugikan pengguna, sehingga pengguna tidak dapat melindungi data pribadinya. Dan dalam hal ini pengguna yang ingin menuntut atas kegagalan perlindungan data pribadi pun dinilai sangat sulit karena dalam Pasal 29 Peraturan Menteri KOMINFO Tentang PDPSE pengaduan hanya dapat dilakukan berdasarkan tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dan telah terjadi kerugian bagi pemilik data

pribadi atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis namun waktu pemberituannya terlambat. Tentu dalam hal ini apabila terjadi kerugian dalam jangka waktu 14 hari sebelum pemberitahuan oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pemilik data pribadi, penyelenggara dapat mengelak dan hilang tanggungjawab atas kegagalan perlindungan dengan berbagai celah hukum tersebut.

Dari semua regulasi tersebut perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem elektronik dalam berbagai regulasi dibebankan oleh pemerintah kepada penyedia layanan *e-commerce*, perlindungan tersebut sebenarnya telah dijelaskan sebelum seorang pengguna memutuskan mendaftar dalam layanan tersebut, hal itu dituangkan dalam bentuk kebijakan privasi. Dalam hal ini pengguna dapat memutuskan setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut, apabila pengguna tidak setuju akan kebijakan tersebut pengguna tidak dapat menggunakan layanan *e-commerce* tersebut.¹⁴ akan tetapi kebijakan privasi yang disediakan oleh layanan *e-commerce* tersebut banyak mengalami kelemahan yang berpotensi mengancam keamanan data dan keselamatan pengguna. Kelemahan kebijakan privasi yang disediakan oleh layanan *e-commerce* tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pengguna, yang mana dalam kebijakan privasi data yang diperoleh dari pengguna terbatas,¹⁵ tetapi tidak terbatas pada saat pengguna melakukan pembayaran pada

¹⁴ Maiche delpiero et.la, Op.Cit., hlm.3.

¹⁵ Tokopedia, "Kebijakan Privasi", tokopedia.com, Artikel, 13 Maret 2022

saat melakukan transaksi hal ini berkaitan dengan data rekening bank, kartu kredit, internet banking dan alat pembayaran lainnya, dengan cakupan data pembayaran yg sangat luas dan tidak terbatas apabila terjadi kebocoran data tentu berakibat buruk akan kebobolan terhadap akun Bank tersebut.

2. Keamanan penyimpanan dan penghapusan data pribadi pengguna. Dalam kebijakan privasi tersebut dikatakan bahwa tidak ada jaminan sepenuhnya akan keamanan data pribadi yang dikirimkan pengguna.¹⁶
3. Tanggung jawab dan ganti rugi akan kebocoran data pengguna, atas tindakan peretasan oleh pihak ketiga. Serta adanya kebijakan privasi yang menyatakan adanya pelepasan hak atas klaim, kerugian dan tuntutan dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan informasi data pribadi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat kekaburan norma terkait perlindungan terhadap data pribadi dan pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah maupun penyedia layanan *e-commerce*. Sehingga data pribadi pengguna layanan *e-commerce* sangat rentan terjadi kebocoran dan pencurian data pribadi, serta tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna layanan *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data. sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Data

¹⁶ Bhinneka, “ Kebijakan Privasi”, bhneka.com, Artikel, 13 Maret 2022

¹⁷ *Ibid*

Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai :

1. Selvina Nur Amalia, NIM: 1112046100168, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Judul : Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi.

Hasil penelitian: Konsep perlindungan data pribadi nasabah berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang direalisasikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang menjelaskan tentang upaya perlindungan kerahasiaan dan keamanan atas data dan/atau informasi pribadi nasabah. Terdapat kesesuaian antara peraturan internal Bank Syariah Mandiri dalam hal perlindungan data pribadi nasabah terhadap regulasi pemerintah. Yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Operasi No. 16/030/OPS Bank Syariah Mandiri perihal Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Penghimpunan Dana Terikat Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan yang diberlakukan mulai tanggal 25 Juli 2014 yang salah satunya merubah atau merevisi

dengan menambahkan surat persetujuan pemberian informasi data nasabah dan pemasaran program/produk oleh bank. Pada praktik di lapangan terdapat indikasi ketidaksesuaian pada salah satu Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Yaitu frontliners pada Kantor Cabang tersebut tidak menjelaskan kepada nasabah mengenai surat persetujuan penggunaan data pribadi nasabah yang diberikan oleh bank. Sedangkan pada dua Kantor Cabang lainnya telah sesuai antara praktik dengan aturan internal Bank Syariah Mandiri. Namun di ketiga Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri yang peneliti survei, semua frontliners Kantor Cabang tidak menyertakan materai pada surat permohonan persetujuan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Selvina Nur Amalia tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subyek. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah perlindungan data pribadi nasabah terhadap regulasi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah nasabah pada bank syariah mandiri.

2. Risa Salsabila Mahasiswi fakultas hukum Universitas Jambi

judul “Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia”

hasil penelitian : fokus utama adalah mengenai perlindungan hukum terhadap bocornya data pribadi yang disebabkan oleh jasa Provider telekomunikasi di Indonesia, yang jika ditarik pengertian provider

telekomunikasi adalah telepon seluler atau operator nirkabel adalah perusahaan telepon yang menyediakan layanan untuk pengguna telepon seluler. Provider tersebut seluruhnya memegang data pribadi setiap konsumennya hal ini dikarenakan setiap awal pendaftaran penggunaan operator konsumen diwajibkan melakukan registrasi data diri secara lengkap yang dikirimkan ke provider tersebut, serta operator tersebut juga secara cerdas mendeteksi perangkat smartphone yang digunakan oleh konsumen. Namun, belakangan publik dihebohkan dengan Bocornya data pribadi kepihak ketiga, yang dilakukan oleh karyawan outsourcing jasa provider telekomunikasi Telkomsel yang korbannya adalah seorang penggiat media sosia yaitu Denny Siregar, data pribadinya tersebar di internet termasuk data warga negara Indonesia secara lengkap dan juga perangkat device yang dia gunakan. Bocornya data pribadi tersebut tentu saja merugikan dirinya secara materil dan imateril yang berdampak terhadap aktivitasnya sehari hari, yang kemudian ia melayangkan gugatan secara perdata kepada telkomsel atas bocornya data tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar 1 Triliun Rupiah. sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang

diajukan konsumen, dan perilaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Risa Salsabila tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subyek. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah perlindungan data pribadi pengguna provider telekomunikasi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah konsumen pengguna produk provider tersebut.

3. Muhammad Fathur dalam tulisan yang berjudul “Tanggungjawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen”

Hasil penelitian: penelitian ini lebih terfokus pada Isu mengenai pencurian data pribadi pada kasus kebocoran data 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta) akun dari *e-commerce* tokopedia. Data yang dimaksud berisi nama lengkap, nama akun, email, toko online, nomor telepon, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenkripsi. Hasil penelitian ini tentang bagaimana pertanggungjawaban tokopedia akan kebocoran data pribadi tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tidak hanya terfokus pada perlindungan data pribadi oleh satu layanan *e-commerce* saja, tetapi mengkaji secara umum kelemahan perlindungan data pribadi dan potensi kebocoran oleh layanan *e-commerce* dengan analisis atas kebijakan privasi yang disediakan oleh layanan *e-commerce* terkait dalam hal perlindungan data pribadi dan pertanggung-jawaban

atas kebocoran data pribadi. serta mengenai bagaimana peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia apakah telah terlaksana dengan maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apasaja bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna layanan *e-commerce* di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia dan kebijakan privasi yang disediakan oleh *e-commerce* pada transaksi *marketplace* di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung-jawab penyedia layanan *e-commerce* khususnya *marketplace* ketika terjadi kebocoran data pribadi pengguna layanan *e-commerce* pada transaksi *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Dan perlindungan hukum dalam kebijakan privasi yang disediakan oleh layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace* ketika terjadi kebocoran data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam menyumbangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terhadap data pribadi.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- b. Merupakan sumbangan pemikiran untuk Fakultas Hukum Universitas Jambi maupun masyarakat umum dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan *e-commerce*.

E. Kerangka Konseptual

Agar mempermudah mengetahui serta memahami pembahasan permasalahan dan penafsiran yang berbeda terhadap judul penelitian skripsi ini, sehingga diperlukan penjelasan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, berikut ini konsep-konsep mengenai hal tersebut.

1. Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan sebagai hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Data pribadi

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa “Data Pribadi

adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”

3. *e-commerce*

Electronic commerce atau yang disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

4. Transaksi *Marketplace*

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara dua pihak,¹⁸ *Marketplace* adalah platform dimana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik.¹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka rangkaian konseptual yang dipergunakan dan dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis suatu peraturan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace*, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan isu yang dibahas. Serta kebijakan privasi yang disediakan layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace*.

¹⁸KBBI, “pengertian transaksi”. <https://kbbi.co.id/>. Di akses tanggal 25 mei2022

¹⁹Kompas.com, “apa itu marketlace dan bedanya dengan toko online maupun e-commerce?”, kompas.com, diakses 25 mei 2022

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan sebagai hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hlm 74.

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdul Khadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*teory liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Menurut teori ini kelalaian penjual (pelaku usaha) yang mengakibatkan munculnya kerugian pada pembeli (konsumen) merupakan faktor penentu dari adanya hak pembeli (konsumen) untuk mengajukan gugatan ganti-rugi kepada penjual.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²² Abdul kadir Muhammad,, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

meskipun bukan kesalahannya tetapi bertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma yaitu dalam hal ruang lingkup data pribadi, pertanggung jawaban ketika terjadi kebocoran dan sanksi.²³ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku di bidang perlindungan data pribadi serta terhadap kebijakan privasi oleh layanan *e-commerce*. Untuk melihat apakah perlindungan tersebut telah mampu atau maksimal melindungi data pribadi para pengguna layanan *e-commerce*.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan penelitian mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek suatu isu hukum yang sedang dicoba pencarian jawabannya. Dalam buku Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa “pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.86

historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual”²⁴

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal demikian dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Mempergunakan penelitian konseptual peneliti memerlukan prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah peneliti menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang terkait perlindungan data pribadi secara elektronik. Dan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

3. Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

²⁴Peter mahmud marzuki, penelitian hukum edisi revisi, kencana prenamediagroup, cetakan ke 9, jakarta, 2014 , hlm. 133.

²⁵ *Ibid.*, hlm.137

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
 - f) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, laporan penelitian hukum, artikel ilmu hukum, bahan seminar dan sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi.
- c. Bahan Hukum Tersier, antara lain adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap data primer

dan data sekunder dalam hal ini adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Maka analisis bahan hukum dianalisis dengan cara menginprestasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, kemudian mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dan menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal 213.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab. Dari bab-bab tersebut dirinci lagi menjadi beberapa sub bab dan dari sub-sub bab tersebut dirinci lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum, Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, data pribadi dan *e-commerce*,

Bab III Pembahasan, pada bagian bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis data hasil dari penelitian dan mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan privasi oeh layanan *e-commerce* dan pertanggung-jawaban atas kebocoran data pribadi oleh layanan *e-commerce*.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah itu dikemukakan pula mengenai saran dalam bab ini.